

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdullah Sjahriful, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian* Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003
- Arief Rahman, *Illegal Migrants dan Sistem Keimigrasian Indonesia; Suatu Tinjauan Analisis*, Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta, 2002
- Ajad Sudrajad Havid, *Formalitas Keimigrasian*, Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM thn 2008
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Penegakan Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana; Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT.Gramedia Utama; Jakarta; 2003
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2002
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, PT Gramedia, Jakarta, 2008
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002
- M. Iman Santoso, “*Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*”, UI Press Jakarta, 2004
- Moh. Arif, *Suatu Pengantar Keimigrasian di Indonesia*. Jakarta: Pusdiklat Departemen Kehakiman, Jakarta, 2007
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang ; Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995
- Ramadhan dan Yusra, Abrar. *Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia*. Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta, 2005
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995
- Saleh Wiramiharja, *Langkah – langkah baru menunjang Peningkatan Profesionalisme Keimigrasian*, Pintu Gerbang No. 45, Jakarta, 2002

Soemardi, *Teori Umum Hukum dan Negara*, Jakarta : Media Indonesia, 2007

Wahyudin Ukun, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, AKA Press Jakarta, 2004

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Direktur Jenderal Imigrasi, *Petunjuk Pelaksana Dirjen Imigrasi, No. F-337.II.02.01 Tahun 1995 tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian*, Jakarta;1995

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Keimigrasian.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014.

Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-18-PW-07-03 Tahun 1993.

C. Lain-lain / Artikel / Jurnal

Ahmad Yulianto, Penegakan Hukum Imigrasi, artikel dari [www/jlps.iblam.ac.id /index.php/jurnal-hukum-dan-kebijakan/article](http://www/jlps.iblam.ac.id/index.php/jurnal-hukum-dan-kebijakan/article) 2016 - Artikel

<https://plus.google.com/103671153020773297522/posts/DaEvxuSLFKL> Sri Haryati, *Resume Hukum Keimigrasian* 2013, diakses bulan Juli 2017